

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, 2013, Pengantar Ilmu Hukum, Bandung: PT. Alumni.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: PT. Alumni.
- Andi Hamzah, 2017, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.
- Samosir, C. D., 1992, Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia, Binacipta.
- Wagiati Soetedjo, 2013, Hukum Pidana Anak, Bandung: PT. Refika Adimata.

Jurnal

- Sujono, S., Sudarto, S., & Putra, H. A. (2024). Analisis Penerapan Restorative Justice Oleh Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Bingkai Arah Pembaharuan Politik Hukum Pidana Di Indonesia. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 6(3), 551-564.
- Rochaeti, N. (2015). Implementasi Keadilan Restoratif Dan Pluralisme Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 44(2), 150-160.
- Risdalina Monalisa, Muhammad Yusuf Siregar, Wahyu Simon Tampubolon (2024). Tinjauan Hukum Turut Serta (Deldeming) Tindak Pidana Pencurian Dilakukan Oleh Anak Sesuai Pasal 363 KUHP Pidana (Studi Putusan No. 04/PID.BA/2013 PN Rantauprapat). *Jurnal Hukum*, 18(3), 2234–2246.
- Emy Rosna Wati (2017). Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. *Justitia Jurnal Hukum*, 1(2).
- Simatupang, R. S. A. (2024). Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan. *Jurnal Yuridis*, 11(1), 54-63.
- Lewoleba, K. K., Mulyadi, M., & Wahyuningsih, Y. Y. (2023). Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif. *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 12(1), 399-412.
- Zenegger, T. A., Ismansyah, I., & Zurnetti, A. (2024). Urgensi Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pengulangan Tindak Pidana. *UNES Law Review*, 6(4), 12120-12133.

- Yulianto, I. (2022). Prinsip Hukum Diversi Terhadap Anak dalam Perkara Pidana dengan Pelaku Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *FENOMENA*, 16(2), 116-125.
- Ansar, N. (2024). Keadilan Restoratif dalam Putusan Pengadilan. *Jurnal Yudisial*, 17(1), 1-22.
- Salam, R. (2025). Analisis Upaya Perlindungan Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) di Kota Banda Aceh (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Fakultas Tarbiyah dan Keguruan).
- Nurida, S. M. (2023). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh dalam Meningkatkan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).
- Audiasih, M. A., & Taufiq Nugroho, S. H. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus Putusan Nomor: 19/PID.SUS-ANAK/2019/PN.JAP) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- NUGROHO, A. (2022). Perlindungan Hukum dalam Penyidikan Terhadap Anak di Bawah Umur yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus di Polres Semarang) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Wahanisa, R., & Adiyatma, S. E. (2021). Konsepsi Asas Kelestarian dan Keberlanjutan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Nilai Pancasila. *Bina Hukum Lingkungan*, 6(1), 93-118.
- Pratiwi, D. C., & Kriswibowo, A. (2022). Implementasi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Surabaya. *Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 7(2), 192-204.
- Fakhria, S. (2022). Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Anak: Telaah Ijtihad Hakim Pengadilan Agama dalam Putusan Hak Asuh Anak. *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 3(3), 363-372.
- Widodo, G. (2016). Sistem pemidanaan anak sebagai pelaku tindak pidana perspektif undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 6(1), 65-67.
- Ismawati, S. (2013). Mekanisme Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Masyarakat Dayak Kanayatn (Kajian Perbandingan Terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak). *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2), 197-209.
- Sinaga, E. Y. (2016). Penerapan Diversi Pada Tahap Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Badamai Law Journal*, 1(2), 201-220.

- Sinaga, E. Y. (2016). Penerapan Diversi Pada Tahap Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Badamai Law Journal*, 1(2), 201-220.
- Hastomo, A. W. E. (2018). UPAYA DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA YANG DIANCAM PIDANA PENJARA 7 TAHUN ATAU LEBIH (TINJAUAN PADA PASAL 7 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. *Badamai Law Journal*, 3(1), 21-40.
- Dewi, P. E. T. (2021). Penegakan Hukum terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum Saraswati*, 3(2).
- Sari, M. A. C. M. (2013). Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 2(1), 44093.
- Bangun, R., Kristiawanto, K., & Dewi, D. S. (2022). Penerapan Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Dikmas: Jurnal Pendidikan Masyarakat dan Pengabdian*, 2(2), 391-402.
- Irianto, D. P. (2016). Kendala Penyidik Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Di Polres Malang Kota) (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Oktariana, M. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.